

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
15-12-2019	15-12 s/d 26-12-2019	25-12-2019	30-12-2019	25-01-2020

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1 No. 1, Januari 2020 (49-60)

Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Identitas Agama dan Pola Gerakan Sosial (Studi Kasus Front Pembela Islam Di Kota Palembang)

Rendi Ariyansyah

Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
rendi2019@gmail.com

Masyhur

Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
masyhur@gmail.com

Abstract

The title of this research is "Religious Identity and Social Movement Pattern (Case Study of Islamic Defenders Front in Palembang City)". This study examines the pattern of FPI social movements in the city of Palembang in upholding Amar Ma'ruf Nahi Munkar and the impact of the use of the religious identity. This paper parses and discusses how the FPI in eradicating immoral place (Controlling) and other social activities carried out by the Islamic Defenders Front in the city of Palembang and how the impact of the use of religious identity on the FPI social movement in the city of Palembang.

The method used in this study is a qualitative method that is the method of field research. In this study there are two sources of data, namely primary data and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interviews, documentation and data were analyzed descriptively qualitatively. Determination of informants in research carried out in a manner that has been determined. The informants chosen in this study were the Chairperson of Palembang City FPI, Palembang City FPI Secretary and Palembang City FPI Secretary General Wing.

Keywords: *religious identity, social movements, political identity*

Abstrak

Judul penelitian ini adalah "Identitas Agama dan Pola Gerakan Sosial (Studi Kasus Front Pembela Islam di Kota Palembang)". Studi ini mengkaji pola gerakan sosial FPI di Kota Palembang dalam menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan dampak dari penggunaan identitas keagamaan. Penelitian ini membahas bagaimana FPI dalam memberantas tempat tidak bermoral (Pengendalian) dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh Front Pembela Islam di kota Palembang dan bagaimana dampak dari penggunaan identitas agama pada gerakan sosial FPI di kota Palembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian lapangan. Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian dilakukan dengan cara yang telah ditentukan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Ketua FPI Kota Palembang, Sekretaris FPI Kota Palembang, dan Sekretaris Jenderal FPI Kota Palembang.

Keywords: *identitas agama, gerakan sosial, politik identitas*

PENDAHULUAN

Masalah dalam penelitian ini untuk melihat pola gerakan sosial Front Pembela Islam di Kota Palembang. Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana pola gerakan sosial FPI di Kota Palembang dalam menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan dampak dari penggunaan identitas Agama tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara FPI dalam memberantas tempat-tempat maksiat dan tempat kios penjualan miras yang mana hal tersebut berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu melakukan aksi-aksi sweeping terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat.

Alasan kenapa ini diteliti karena FPI dikenal sebagai ormas Islam yang menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi munkar*, penegakkan ini menginspirasi semua metode dakwahnya baik di jalan maupun pengajian. Kategori perbuatan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang di definisikan tidak hanya mencakup masalah syariah. Melainkan juga mencakup urusan sosial, politik, ekonomi dan budaya (Syarif Zain, 2019).

Tujuan utama dari FPI adalah menegakkan amar *ma'ruf nahi mungkar*. *Amar ma'ruf* adalah perintah untuk melaksanakan segala perkara yang baik menurut hukum syara' dan hukum akal. Sedangkan *nahi mungkar* adalah mencegah setiap kemungkaran /kejahatan, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh *syara'* dan hukum akal. Selain itu tunduk pada *syari'at Islam* dan tunduk pada hukum Negara selama tidak berbenturan dengan ajaran Islam. Sehingga, bila peraturan dan perundang-undangan negara yang bertolak belakang dengan *syari'at Islam*, maka FPI dalam perjuangannya akan berusaha untuk menyiasatinya hingga terhindar dari jebakan melawan hukum negara.

Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan FPI yang mengutamakan metode kebijaksanaan dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut),

memberi *mau'idzah hasanah* (nasehat yang baik), dan berdiskusi dengan cara terbaik. Sedangkan dalam melakukan *nahi mungkar*, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah menggunakan kekuatan bila mampu dan lisan dan tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka *nahi mungkar* dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran (Ismail, 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) ialah suatu organisasi Islam yang ada di Kota Palembang, yang tujuannya untuk mendukung syariat Islam serta penegakan *amar makruf nahi munkar* di kota Palembang. Strategi yang dilakukan FPI adalah *Controlling* (mengawasi) ke tempat-tempat maksiat seputar kota banda aceh, FPI selalu menggunakan cara konfrontatif saat turun mimbar ke jalan, merazia tempat-tempat maksiat seperti tempat perjudian dan dunia malam lainnya, dan menggunakan cara persuasif biasanya melalui pengajian, zikir, berdakwah dan tabliq akbar. Kemudian dalam gerakan kegiatan sosial FPI Kota Palembang, seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan dan politik.

Dari pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa FPI sebagai salah satu ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah dengan tujuan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu latar belakang berdirinya organisasi ini adalah karena sudah merajalela dan menjamur kemaksiatan hampir di semua sektor kehidupan umat. Oleh karena itu tidaklah meherankan jika gerakan anti maksiat dicetuskan semenjak FPI dideklarasikan. Dalam gerakannya FPI menggunakan Hadist Nabi SAW dan Alqur'an untuk melegitimasi cara *beramar ma'ruf nahi munkar*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Menurut jenis, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang berdasarkan data-data.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif (Sugiyono, 2008). Fokus penelitian ini pada identitas Agama sebagai landasan gerakan dan legitimasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) di Kota Palembang pada komunitas FPI sebagai objek penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan sosial dalam bahasa inggris (*social movement*) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. (Mikail, 2019)

Gerakan sosial mencul dalam segala bentuk dan ukuran . Untuk memenuhi berbagai jenis fenomena ini di perlukan sebuah tipologi yang menggunakan berbagai kreteria seperti berikut. Gerakan sosial yang berbeda menurut bidang perubahan yang di inginkan .Ada yang terbatas tujuannya hanya untuk mengubah aspek tertentu kehidupan masyarakat tanpa menyentuh inti struktur institusinya gerakan yang hanya mengiginkan perubhan di dalam ketimbang perubahan masyarakatnya sebagai keseluruhan.ini di sebut gerakan *reformasi*.

Gerakan sosial yang berbeda dalam kualitas perubahan yang di inginkan.Ada gerakan yang menekankan pada inovasi, berjuang untuk memperkenalkan institusi baru, bentuk kehidupan baru, dan keyakinan baru. Orientasi gerakan ini adalah ke masa depan dan gerakan ini d sebut gerakan *progresif*. Gerakan yang berbeda dalam target perubahan yang di inginkan. Ada memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial dan ada pada perubahan individual. Gerakan perubahan structural dalam bentuk gerakan sosial politik yang berupaya mengubah statifikasi politik, ekonomi, dan kelas.

Gerakan sosial yang berbeda dalam strategi yang melandasi atau logika tindakan mereka. (Mokhtari, 2019) Ada yang mengikuti logika instrumental gerakan seperti ini berjuang untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dengan kekuatan politik itu memaksakan perubahan yang di inginkan dalam peraturan hukum, institusi, dan organisasi masyarakat. Tujuan utama mereka adalah control politik.

Teori gerakan sosial dapat di pergunakan untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial secara umum, termaksud gerakan sosial Islam (Syarif Zain, 2019). Kendati demikian bagian tertentu gerakan sosial Islam memiliki kekhasan yang tidak sepenuhnya sama dengan gerakan sosial yang dibuat untuk memahami gerakan Islam Syariah yang menjamur di Indonesia. (Ismail, 2016)

Gerakan Kelompok Kepentingan

Di sini peneliti menggunakan teori gerakan Kelompok kepentingan yang memiliki pengertian sebagai organisasi yang dibentuk oleh sejumlah orang karena adanya kesamaan sikap, kepercayaan, dan tujuan. Kelompok kepentingan pada dasarnya asosiasi manusia yang terorganisir, memiliki keanggotaan, pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi ke dalam maupun ke luar organisasi. Dalam sistem politik, sebagaimana teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan memiliki fungsi artikulasi, yakni memperkuat dan mengefektifkan penyampaian aspirasi/tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain fungsi artikulasi, kelompok kepentingan juga menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah (Sagita, 2016).

Terdapat 4 (empat) jenis kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kehidupan sosial politik, yaitu:

- a) Kelompok anomik, yakni kelompok kepentingan yang berasal dari unsur masyarakat dan tidak memiliki nilai atau norma standar yang mengatur sebagaimana halnya dalam suatu organisasi. Gerakan politik dilakukan secara spontan dan partisipasi politik cenderung bersifat non konvensional.
- b) Kelompok non asosiasional, merupakan kelompok yang tidak terorganisir dengan baik, tidak memiliki agenda kerja secara berkala, umumnya berasal dari klan keluarga yang berpengaruh, pemimpin-pemimpin agama, kelompok etnis, kelompok regional maupun lokal. Gerakan politik yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan pribadi dan kedekatan dengan elit politik.
- c) Kelompok institusional adalah kelompok kepentingan yang bersifat formal, berbadan hukum. Anggota kelompok ini umumnya berasal dari basis profesi yang sama.
- d) Kelompok asosiasional adalah kelompok kepentingan yang bersifat formal, menggunakan staf yang bekerja penuh, memiliki agenda dan prosedur kerja yang teratur dan diakui masyarakat atas kemampuannya secara efektif menyampaikan tuntutan kepada pemerintah

Sedangkan dalam konteks kehidupan bernegara, Kelompok kepentingan memiliki 4 (empat) peranan dalam kehidupan bernegara yaitu:

1. Katalisasi perubahan sistem dengan cara melakukan advokasi dan berusaha membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap masalah-masalah yang penting dalam kehidupan. Melalui peran ini, kelompok kepentingan berusaha mengembangkan kemauan politik dan inisiatif masyarakat sehingga dapat bersama-sama mempengaruhi kebijakan;
2. Monitoring atau melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melakukan kritik hingga memprotes apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum oleh pejabat negara;
3. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Kelompok kepentingan ini kerap membela masyarakat umum yang kerap menjadi korban kekerasan dan korban ketidakadilan hukum oleh pemerintah, dan
4. Mewujudkan sejumlah program dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam penyampaian kepentingan, kelompok kepentingan bisa jadi berubah menjadi kelompok penekan apabila upaya penyampaian tuntutan disampaikan secara intensif dengan cara melancarkan taktik-taktik dan tekanan politik yang luar biasa untuk mempengaruhi kebijakan, sehingga pemerintah maupun pejabat politik bersedia menyetujui tuntutan mereka.

Pola Gerakan Sosial Front Pembela Islam Di Kota Palembang

Gerakan menutup tempat maksiat atau razia itu pernah dilakukan. FPI Kota Palembang berkordinasi langsung dengan Polisi. Karena menurut FPI tidak ada payung hukum untuk FPI melakukan itu, jadi FPI kordinasi dengan pemerintah Kota atau Provinsi bahwa FPI

mendapatkan laporan dari masyarakat, setelah itu FPI membuat surat mulai dari tingkat Lurah, Kecamatan, Walikota dan Gubernur sampai ada respon dari pemerintah. FPI membuat surat laporan bahwasannya di lokasi pasar kuto lorong kulit ada prostitusi maupun minuman keras. Setelah itu melakukan rapat untuk mengkordinasi kapan kelapangan. FPI juga ikut serta turun lapangan. Tapi yang melakukan penangkapan, penyitaan dan sebagainya ataupun *sweeping* itu Polisi dan TNI. Gambar di bawah ini adalah hasil laporan FPI.

Gambar 1. Kegiatan Kontroling FPI Kota Palembang.



Muhammad Isa Anshori menyebut bahwa:

“Pada saat itu FPI tidak ikut, tapi yang berhak melakukan itu aparat dan FPI hanya kerja sama dengan aparat tersebut.”(wawancara dengan M Isa Anshori, sekretaris FPI Sumsel)

Kemudian ketua FPI Al-Habib Mahdi menjelaskan bahwa:

“Ini adalah razia yang di lakukan polisi, atas laporan FPI, jadi kegiatannya FPI tidak berjalan sendiri, karena FPI ada mekanisme prosedur gerakan”. (Wawancara dengan Habib Mahdi Syahab, ketua FPI Sumsel)

Untuk mengetahui secara umum pola gerakan FPI dalam merespon kemunkaran terutama yang berkaitan dengan penyakit masyarakat sangat bergantung pada kondisi lokasi terjadinya kemunkaran tersebut. Jika masyarakat setempat mendukung terjadinya kemaksiatan, maka FPI akan menggunakan cara persuasif, biasanya melakukan pengajian, zikir, berdakwah dan tabligh akbar.

FPI akan melaporkan ke aparat paling rendah seperti lurah, camat dan polsek beserta bukti-buktinya, mereka memintak tanda bukti atas laporan FPI, kemudian para anggota FPI Kota Palembang meminta batas waktunya, jika masalah itu diselesaikan oleh aparat paling rendah berarti dianggap selesai. Tetapi jika aparat tidak mampu, FPI akan membawah masalah ini ketingkat Walikota, dan Polres, bahkan sampai ke polda dan Gubernur. Prinsipnya FPI tidak akan melaporkan ke aparat yang jenjangnya lebih tinggi jika sudah bisa ditangani di level bawahnya. .”(wawancara dengan M Isa Anshori, sekretaris FPI Sumsel)

Jika aparat tingkat Gubernur dan Polda tidak juga bertindak, maka FPI akan melakukan dialog dengan instansi Pemerintah sekaligus pemilik tempat maksiat yang di maksud. Para anggota FPI ingin tahu apa yang masyarakat pelaku maksiat itu inginkan serta mereka di dakwahi. Jika langkah atau kesempatan dialog ini juga tidak membuahi hasil, maka FPI akan melakukan unjuk rasa secara damai. Ini ialah salah satu dari peluang atau kesempatan FPI di dalam gerakannya untuk mendukung syariat Islam di Kota Palembang, dan FPI pun terus berjuang di dalam mendukung syariat Islam dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* demi kemaslahatan umat Islam, dan terus melakukan syiar-syiar agama, berdakwah, berdzikir dan hisbah di kota palembang, supaya kota palembang menjadi kota yang di banggakan oleh umat Islam dan menjadi Kota yang syariat Islam nya tinggi. Menurut Muhammad Isa Anshori bahwa:

“Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah maka FPI akan melakukan gerakan atau demo, untuk demo FPI selalu menggunakan demo damai bukan anarkis, kalau ada kekerasan atau anarkis bahwasannya propokator yang mengatas namakan FPI, masalah baju FPI banyak dijual dimana-mana buat sendiri juga bisa. Untuk anak-anak FPI itu insyaallah dibawah komando ulamanya, tidak pernah melakukan kegiatan seperti itu sebelum ada perintah dari gurugurunya”.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam pola gerakan *Controllingnya* FPI Kota Palembang selalu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh organisasi untuk melakukan aksi-aksinya. FPI selalu menggunakan cara konfrontatif saat turun mimbar ke jalan, merazia tempat-tempat maksiat yang ada di Kota Palembang seperti tempat perjudian, pelacuran dan dunia malam lainnya. Aksi yang mereka lakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa tempat tersebut ada prostitusi atau semacamnya. Maka FPI membuat surat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Walikota dan Gubernur. Setelah mendapatkan respon dari pemerintah untuk melakukan penutupan tersebut. Dalam melakukan aksinya FPI Kota Palembang selalu menggunakan jalur hukum. FPI kota Palembang selalu direspon baik dari pemerintahan, sehingga tidak terjadi konflik seperti di Jawa. FPI pusat juga sebenarnya sama tapi dari pihak media selalu menyiarkan eksennya saja dan tidak melihat tahapan-tahapannya.

Pola Gerakan FPI Dalam Kegiatan Keagamaan

Untuk kegiatan keagamaan FPI di Kota Palembang tidak jauh dari majlis takqlim. Jadi seluruh laskar FPI yang tergabung di Front Pembela Islam dan sayap juang itu diwajibkan mengikuti Majelis Ta'lim.

Adapun kegiatan keagamaan FPI Kota Palembang sebagai berikut:

- a) Membuka pegajian rutin satu pekan sekali di berbagai tempat yang ada diwilayah Kota Palembang pada khususnya dan wilayah Provinsi Sumatera Selata pada umumnya.

- b) FPI Kota Palembang juga membuat lembaga dakwah yang resmi di bawah naungan FPI. Lembaga dakwah ini diberi nama Majelis Pencita Islam (MPI), lembaga dakwah ini diresmikan pada tahun 2010 dibawah kepemimpinan habib Umar bin Alwi Assegaf, lembaga ini mengadakan pengajian dari rumah ke rumah, masjid ke masjid dan seterusnya yang diadakan setiap sepekan satu kali tepatnya tiap malam rabu dan terbuka untuk umum.
- c) Mengadakan pengajian rutin di markas FPI di Kota Palembang setiap kamis malam jum'at terbuka untuk umum.
- d) Mengadakan majelis taqlim atau tabligh akbar di masjid Daarul Muttaqin setiap hari jum'at malam sabtu dan terbuka untuk umum.
- e) Membuka pelatihan da'i di Kota Palembang yang mana anggotanya bukan hanya kader FPI akan tetapi siapapun yang berminat untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pola gerakan FPI dalam kegiatan keagamaan yaitu melakukan Majelis Taqlim atau Tabligh Akbar dari masjid-kemasjid khususnya di masjid Daarul Muttaqin, itu dilakukan setiap malam sabtu. Kemudian pengajian rutin di markas FPI setiap malam jum'at, dan membuka pelatihan da'i di Kota Palembang, jadi kegiatan keagamaan organisasi ini terbuka untuk umum.

Pola Gerakan FPI Dalam Kegiatan Sosial

Pendidikan

Mengadakan pendidikan secara gratis di markas FPI setiap hari dari sesudah magrib sampai isya, khususnya belajar tentang agama seperti, pengajian hapalan kitab-kitab, dan lain-lainnya. Adapun yang belajar di mulai dari anak-anak, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Ada yang dari Kerta Pati, Alang-Alang Lebar, Basuki Rahmat dan lain-lain.

Kesehatan

- 1. Mengadakan sunatan masal setiap satu tahu sekali secara cuma-cuma.
- 2. Mengadakan donor darah secara sukarela ketika ada yang membutuhkan.
- 3. Menyediakan mobil ambulance untuk masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya secara gratis.
- 4. Ikut melakukan bakti sosial yang diadakan oleh pemerintah bila diminta dan melakukan bakti sosial yang diadakan oleh masyarakat sekitar walaupun tidak diminta.
- 5. Membuka posko-posko untuk para korban yang terkena musibah baik itu kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain-lain yang wilayahnya masuk wilayah Sumatra Selatan.

Habib Mahdi menambahkan, dalam bidang kesehatan FPI "FPI memiliki anak organisasi yaitu Hilal Merah Indonesia (HILMI) yang bergerak ketika ada musibah dan lain-lainnya. FPI

alhamdulillah tetap eksis di level nasional dan internasional maupun di Kota Palembang itu juga dilakukan”.

Dapat disimpulkan bahwa pola gerakan FPI dalam kegiatan sosial yaitu dalam bidang pendidikan FPI memberikan pendidikan secara gratis khususnya pendidikan keagamaan seperti, mengaji, menghafal Al-Qur'an dan pengetahuan agama lainnya. Sedangkan untuk kegiatan kesehatan FPI di Kota Palembang umumnya di Sumatera Selatan seperti, donor darah, sunat masal, menyediakan mobil ambulan, bakti sosial dan membuka posko-posko bagi yang terkena musibah, baik itu kebakaran, tanah longsor dan bencana lainnya baik itu di Sumatera Selatan maupun luar Sumatera Selatan. Hilal Merah Indonesia (HILMI) adalah anak organisasi FPI yang bergerak untuk membantu ketika ada musibah yang terjadi di Sumatera Selatan.

Pola Gerakan FPI Dalam Kegiatan Politik

Untuk kegiatan politik FPI tidak pernah terlibat dengan politik praktis dan FPI tidak akan menjadi partai politik, tapi FPI berhak untuk memperjuangkan aspirasinya melalui jalur politik hanya memberikan dukungan kepada calon-calon yang dianggap oleh FPI mampu untuk mengemban amanah dan mewujudkan apa yang di cita-citakan oleh bangsa dan negara juga merupakan cita-cita dari FPI. Seperti silaturahmi yang dilakukan DPP partai bulan bintang (PBB) bersama pengurus DPW PBB Sumsel dan DPC PBB Palembang, ke markas Front Pembela Islam (FPI), minggu (8/4) sore mendapatkan kesimpulan bahwa FPI siap mendukung dan memperjuangkan calon legislatif (caleg) 2019 dari PBB di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Dampak Penggunaan Identitas Agama Pada Pola Gerakan Sosial Front Pembela Islam Di Kota Palembang.

Adapun pola gerakan sosial dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPI di Kota Palembang itu berdampak positif. Pertama, pola gerakan FPI dalam kegiatan *Controlling* menutup tempat maksiat FPI di Kota Palembang belum pernah terjadi konflik dengan aparat, karena FPI bekerja sama dengan pihak aparat untuk melakukan penutupan tempat maksiat, perjudian, minuman keras dan prostitusi di lokasi pasar kuto lorong kulit. FPI hanya melaporkan, yang wajib melakukan penyeragaman adalah aparat pemerintahan.

Kedua, kegiatan dibidang keagamaan seperti, majlis taqlim, pengajian, hapalan Al-qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya. Ketiga, kegiatan di bidang sosial, pendidikan, yaitu FPI mengadakan pedidikan secara gratis di markas FPI terbuka untuk umum yang ingin belajar. Kemudian kesehatan yaitu donor darah, sunatan masal, menyediakan ambulan secara gratis, bakti sosial dan membuat posko-posko untuk yang terkena musibah seperti korban kebakaran, longsor dan bencana lainnya. Keempat, kegiatan politik FPI untuk memperjuangkan aspirasinya

melalui jalur politik dan hanya memberikan dukungan kepada calon-calon yang dianggap FPI mampu untuk mengemban amanah dan mewujukan apa yang di cita-citakan oleh bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pola gerakan sosial FPI di Kota Palembang dalam kegiatan-kegiatannya yaitu:

1. Salah satu pola aksi lapangan yang digunakan FPI adalah *controlling* tempat-tempat maksiat. Biasanya dilakukan FPI setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan tentunya mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan dengan standar prosedur FPI.
2. Pola gerakan FPI dalam kegiatan keagamaan yaitu, melakukan Majelis Ta'lim atau Tabligh Akbar dari masjid-kemasjid khususnya di masjid Daarul Muttaqin, itu dilakukan setiap malam sabtu. Kemudian pengajian rutin di marakas FPI setian malam jum'at, dan membuka pelatihan da'i di Kota Palembang, jadi kegiatan keagamaan organisasi ini terbuka untuk umum.
3. Pola gerakan FPI dalam kegiatan sosial yaitu, dalam bidang pendidikan FPI memberikan pendidikan secara gratis khususnya pendidikan keagamaan seperti, mengaji, menghafal Al-Qur'an dan pengetahuan agama lainnya. Sedangkan untuk kegiatan kesehatan FPI di Kota Palembang umumnya di Sumatera Selatan seperti, donor darah, sunat masal, menyediakan mobil ambulans, bakti sosial dan membuka posko-posko bagi yang terkena musibah, baik itu kebakaran, tanah longsor dan bencana lainnya di Sumatera Selatan. Hilal Merah Indonesia (HILMI) adalah anak organisasi FPI yang bergerak membantu ketika ada musibah yang terjadi di Sumatera Selatan.
4. Pola gerakan FPI dalam kegiatan politik untuk menyuarakan atau mendukung para caleg-caleg yang minta bantuan kepada FPI, terlebih dahulu harus ada kesepakatan dan membantu atau membela umat Islam dan memperjuangkan syariat Islam. Jika para caleg tersebut bersedia maka FPI siap membantu untuk memperjuangkan aspirasinya melalui jalur politik. Karena ini dianggap kewajiban bagi umat Islam dan merupakan tanggung jawab sebagai rakyat.

Adapun dampak dari penggunaan identitas agama pada pola gerakan yang dilakukan FPI dalam kegiatan-kegiatannya itu selalu direspon baik pemerintah dan diterima masyarakat kota Palembang. Karena dampak dari setiap gerakan atau aksinya tidak pernah terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Baldi dan Zuhdiyah. 2015. *Tafsir*. Palembang: Noerfikry.
- Annur, Saipul. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Palembang: Grafika Telindo Press.
- Faiz Fahrudin. 2014. Jurnal. “*Front Pembela Islam: Antara Kekerasan Dan Kematangan Beragama*” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Faiz, F. 2017. *Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama, Kalam*. Diakses pada jum’at 23 november 2018 pukul 05:54
- Febriansyah Ari Ismail. 2016. Skripsi. *Kontsruksi Gerakan Islam Pembela Islam (FPI) Di Kota Makassar*.
- Indrawati Novie Sagita. Jurnal. *Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan Dalam Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*. Vol. 1, No. 2, Oktober 2016.
- Jamhari, J. J. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo persada. Diakses pada Selasa 20 november 2018 pukul 10:14 WIB dari Jurnal Tata Sukayat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Jamil Abdul. 2013. Jurnal. *Islam dan Kebangsaan: Teori dan Praktik Gerakan Sosial Islam Di Indonesia*. Bandung: penelitian puslitbang keagamaan.
- Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia. Hlm. 132. Dari Jurnal Politik Profetik Volume 7, No. 1 Tahun 2019
- Kusuma, Dodiana. 2010. Skripsi. “*Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Demokrasi Project.
- Machdani Laode Afala. 2018. *Politik Identitas Di Indonesia*. Malang: UB Press.
- M. Muji Buddin SM. 2017. Skripsi. “*Tindakan Varian Radikalisme Front Pembela Islam (FPI) Mojokerto*”. Yogyakarta.
- Marzatilla Mirja. 2017. Skripsi. “*strategi dakwah front pembela islam (FPI) dalam mendukung syariat islam di kota banda aceh*”. Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
- Mikail, K., & Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064>
- Mokhtari, M. (2019). A Study on the Social Movements in Contemporary Islamic Thought. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 114-129. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4389>
- Nasution, N. (2017). Ulama dan Politik: Keterlibatan Ulama Sumatera Selatan dalam Politik Praktis dan Community Empowerment Pada Abad XX. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 126-144. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4038>
- Pertiwi, Aulia. 2015. Skripsi. “*analisis kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri oleh ormas FPI (front pembela islam) di wilayah hukum kota makassar (studi kasus 2011-2013)*”, universitas hasanuddin makassar.

- Qomar, M. 2014. *Implementasi Aswaja dalam Perspektif NU di Tengah Kehidupan Masyarakat, Kontemplasi*. Volume 02 Nomor 01, Agustus. 161183. Diakses pada jum'at 23 november 2018 pukul 05:42 WIB dari Jurnal Tata Sukayat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saberi, R. (2019). Ethnic Enclosure in Multicultural Muslim Community Life: Case Study in Golestan Province, I.R. Iran. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 84-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4333>
- Sugiyono. 2008. *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA).
- Suryani dan Ana Sabhana Azmy. 2016. *Politik Identitas dan Nasionalisme Kebangsaan*. Jakarta: jurnal Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Uin Syarif Hiyahatullah Jakarta.
- Syaefuddin Machfud. 2014. Jurnal. “*Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*”. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.
- Syarif Zain, Z., & Ari, A. (2019). The Efforts of Islamic Splinter Movements to Withstand from Heretical Issue in Indonesia: Study of LDII, MTA and Jam'iyatul Islamiyah. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 97-113. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4331>
- Wahib Abdul Situmorang. 2007. *Gerakan sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasin, Yusuf. 2016 Skripsi. “*Sejarah Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang, 1999-2016*”. Palembang.